

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan mikro di Indonesia, khususnya dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat disektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sistem perbankan nasional di bagi dalam kategori utama bank yaitu : Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perekonomian Rakyat. Untuk memperkuat peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” telah resmi diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga mencerminkan arah kebijakan yang lebih progresif dalam memperluas jangkauan layanan keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sekaligus memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Secara nasional, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2024, terdapat lebih dari 1,356 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) aktif di Indonesia, dengan total aset mencapai lebih dari Rp 12,460 triliun. Penyaluran kredit oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagian besar ditujukan kepada sektor UMKM, sementara penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai lebih dari Rp 14,487 triliun. Hal ini menegaskan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) selain berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi lokal. Dalam menghadapi tantangan industri seperti meningkatnya risiko kredit, kompleksitas operasional, dan disrupti digital, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi krusial dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ditengah dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi persyaratan penting untuk membangun kepercayaan publik dan dunia internasional sebagai syarat mutlak agar dunia perbankan dapat berkembang secara sehat, (Reviu et al., 2020). Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan pertumbuhan industri perbankan, karena tanpa adanya kepercayaan dari nasabah dan investor, kegiatan operasional bank akan sangat terhambat. Oleh karena itu, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengembangkan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Tata kelola perusahaan ini telah diatur sejak diberlakukannya POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sejalan dengan dikeluarkannya UU2PSK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No.9/POJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi ini mempertegas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Salah satu aspek penting yang diatur adalah struktur dan kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi, serta pengelolaan jumlah aset sebagai indikator kapasitas dan tata kelola perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, serta menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kepemilikan saham tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 31 POJK tersebut. Selain itu, jumlah aset yang dimiliki Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga menjadi indikator penting dalam penentuan struktur tata kelola, seperti jumlah minimum anggota direksi dan komisaris, serta kewajiban pembentukan unit-unit pengawasan internal. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat dijalankan secara profesional, independen, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian agar mampu mempertahankan daya saing dan kinerja keuangannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rata-rata *Return On Assets* (ROA) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di indonesia pada

tahun 2024 tercatat sebesar 1,46%, yang menunjukkan kecenderungan stabil meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi dan peningkatan risiko kredit. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mempertahankan profitabilitas di tengah kompetisi dan disrupti digital yang terus berlangsung. Dengan demikian, kualitas tata kelola yang dijalankan oleh manajemen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan cara langsung maupun tidak langsung berkorelasi terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan *Return On Assets* (ROA).

Dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank, terdapat berbagai indikator yang digunakan, seperti *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Namun *Return On Assets* (ROA) di pandang sebagai indikator yang paling komprehensif dan relevan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan profitabilitas suatu bank, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Hal ini disebabkan karena *Return On Assets* (ROA) mengukur kemampuan pengelolaan oleh pihak manajemen dalam mengelola seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga mencerminkan performa keuangan secara menyeluruh. Berbeda dengan NPL yang hanya berfokus pada kualitas kredit, LDR yang menilai likuiditas, BOPO yang menggambarkan efisiensi operasional, atau CAR yang menilai kecukupan modal, ROA secara langsung mencerminkan hasil akhir dari sinergi semua aspek operasional dan manajerial yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menetapkan *Return On Assets* (ROA) sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian tingkat kesehatan bank, yang menjadikan *Return On Assets* (ROA) sebagai tolak ukur strategis bagi pemangku kepentingan, regulator, dan manajemen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam menilai kinerja keuangan secara agregat. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, fokus pada *Return On Assets* (ROA) menjadi pilihan yang logis dan strategis, karena tidak hanya mencerminkan efisiensi internal, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola perusahaan dalam mendorong profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) No.11/SEOJK.03/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS aspek rentabilitas (*earnings*) dinilai menggunakan indikator utama yaitu ROA dan BOPO.

Penelitian terdahulu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara Pegaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator kinerja keuangan, khususnya *Return on Assets* (ROA). Penelitian Pracinthea (2019) yang menyatakan bahwa struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan struktur kepemilikan saham manajerial serta jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap ROA. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sifa, I. O., Widasari, E., & Fatimah, (2023) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang mencakup dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Penelitian Juniasti (2022) menunjukkan bahwa Direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun secara simultan Semua variabel direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, secara bersama-sama simultan mempengaruhi ROA. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Assets* (ROA), perlu diuji secara lebih kontekstual dalam studi kasus Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang relevan untuk dikaji adalah PT BPR Darmawan Adhiguan Lestari yang berlokasi dibekasi. Berdiri sejak 1992. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ini telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan aset mencapai Rp 82,684 miliar pada tahun 2024 perusahaan ini juga telah mengalami perubahan struktur kepemilikan yang besar, dimana Farai Tody menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 99,99%. Dari sisi operasional, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ini telah menerapkan struktur tata kelola sesuai POJK No. 9 Tahun 2024, mencakup keberadaan dewan komisaris, direksi, serta kepemilikan saham komisaris, kepemilikan saham direksi.

Selain itu, perusahaan ini menjadi mitra magang mahasiswa Program Studi D4 Analisis Keuangan Universitas Kristen Indonesia, sehingga memungkinkan akses langsung terhadap data primer. Meskipun secara eksplisit tidak terdapat

permasalahan serius, belum ada kajian empiris yang secara khusus mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berdampak terhadap kinerja keuangan di Bank Peronomian Rakyat (BPR) ini. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kebutuhan untuk melakukan evaluasi berbasis data terhadap efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan karakteristik kelembagaan dan struktural yang unik. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan literatur akademik dibidang tata kelola pada lembaga keuangan mikro, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi manajemen Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan regulator dalam merancang kebijakan penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Namun demikian, sampai saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji seberapa besar pengaruh penerapan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) terkait tata kelola perusahaan terhadap kinerja lembaga keuangan, khususnya di Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk difokuskan untuk menganalisis pengaruh penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PT. BPR DARMAWAN ADHIGUNA LESTARI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh struktur dewan komisaris terhadap *Return on Assets* pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari?
2. Bagaimana pengaruh struktur direksi terhadap *Return on Assets* Pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham komisaris terhadap *Return on Assets* pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham direksi terhadap *Return on Assets* pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari?

5. Bagaimana pengaruh jumlah aset terhadap *Return On Assets* pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari?
6. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan yang terdiri dari dewan komisaris, direksi, kepemilikan saham komisaris, kepemilikan saham direksi, jumlah aset terhadap *Return on Assets* pada PT BPR Darmawan AdhigunaLestari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguji pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh direksi terhadap kinerja keuangan PT BPR darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan saham komisaris terhadap kinerja keuangan PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan saham direksi terhadap kinerja keuangan PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah aset terhadap kinerja keuangan PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.
6. Menganalisis dan menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan terhadap kinerja keuangan PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari berdasarkan rasio *Return On Assets*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tercantum dibawah ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi dibidang tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan lembaga keuangan mikro, khususnya dalam konteks Bank Perekonomian

Rakyat (BPR).

2. Secara Praktis Bagi Manajemen PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang efektif dalam memengaruhi kinerja keuangan.

3. Bagi Regulator OJK

Temuan ini dapat menjadi masukan untuk menilai dampak penerapan POJK No.9 Tahun 2024 terhadap kinerja dan tata kelola BPR secara lebih empiris.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dan pemahaman terhadap praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengaruhnya dalam konteks manajerial dan keuangan disektor perbankan mikro.

5. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya kajian akademik yang menghubungkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama berdasarkan regulasi terbaru POJK No. 9 Tahun 2024, yang masih jarang dikaji secara spesifik di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap indikator kinerja keuangan lainnya, maupun pada jenis lembaga keuangan lainnya, baik dalam skala nasional maupun regional.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan terarah. Batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek, yaitu PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.
2. Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2014 hingga 2024, dengan data yang dikumpulkan secara *time series* triwulan, sehingga diperoleh total 41

- data observasi
3. Penelitian hanya menggunakan indikator *Return on Assets* sebagai ukuran dari kinerja keuangan perusahaan
 4. Variabel independen yang digunakan untuk menganalisis *Good Corporate Governance* (GCG) terbatas pada:
 - a. Dewan komisaris (Jumlah komisaris)
 - b. Dewan direksi (Jumlah direksi)
 - c. Kepemilikan Saham Komisaris
 - d. Kepemilikan saham Direksi
 - e. Jumlah Aset
 5. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari yang tersedia melalui situs resmi OJK dan perusahaan terkait.
 6. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada metode kuantitatif dengan regresi linear berganda, serta uji asumsi klasik untuk untuk menguji pengaruh parsial maupun simultan antara variabel, sehingga hasil yang diperoleh bersifat empiris dan terukur sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori, kajian empiris, serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil pengujian hipotesis, yang mencakup tahapan pengumpulan data, proses pengolahan data, serta analisis terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya .

